

**FUNGSI PENGORGANISASIAN DAKWAH
DI DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI Keadilan Sejahtera
KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial Islam

Disusun oleh :

SITI LATIFAH
NIM : 04240026

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Pengorganisasian dakwah merupakan suatu cara menghimpun dan mengatur Sumber Daya Manusia yang dimiliki suatu lembaga maupun organisasi politik kedalam suatu kerangka struktur dan hubungan menurut pola tertentu sehingga dapat melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Islam merupakan agama dakwah yang menyeru umatnya untuk berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Persoalan yang pertama kali timbul dalam Islam menurut sejarah bukanlah persoalan keyakinan melainkan politik, sedangkan perkembangan organisasi politik tidak terlepas dari adanya pemanfaatan fungsi pengorganisasian yang merupakan salah satu bentuk fungsi manajemen. Maka dari itu, Islam di Indonesia tidak mungkin terlepas dari adanya partai politik, dimana partai politik merupakan wadah aspirasi rakyat yang nantinya akan disalurkan melalui kelembagaan.

Partai politik akan mengemban amanah yang diserukan dan untuk atas nama kepentingan masyarakat. Salahsatu partai politik di Indonesia yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai politik yang didalam kegiatan politiknya terdapat nilai-nilai dakwah. Fungsi pengorganisasian sangat penting dalam menghubungkan politik dengan dakwah sehingga terjadi koordinasi dalam partai tersebut. Koordinasi yang dimaksud dalam hal ini yaitu suatu proses hubungan antara suatu kegiatan dakwah yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat dan dilakukan oleh partai politik.

Aktivitas pengorganisasian dakwah yang dilakukan oleh suatu partai politik terdiri dari beberapa langkah tindakan antara lain : spesialisasi kerja, departementalisasi, dan rentang kendali. Semua aktivitas pengorganisasian yang telah disebutkan tidak lain untuk menumbuhkan pendalaman terhadap tugas-tugas dalam penyelenggaraan aktivitas dakwah. Sehingga kegiatan-kegiatan dakwah yang dilakukan oleh partai politik akan dibagi-bagi kedalam tugas-tugas yang lebih terperinci dan akan memudahkan bagi pendistribusian tugas kepada para pelaksana/anggota kader agar setiap pelaksana akan lebih jelas dengan tugas yang telah diamanah.

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa penerapan fungsi pengorganisasian dakwah sangat penting bagi keberlangsungan penyelenggaraan aktivitas dakwah dalam suatu organisasi politik. Oleh karena itu, mendorong penulis untuk tertarik mengadakan penelitian dengan judul :

Fungsi Pengorganisasian Dakwah Di Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta.



Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Hal : Persetujuan skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Siti Latifah
Nim : 04240026
Judul Skripsi : FUNGSI PENGORGANISASIAN DAKWAH DI
DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA KOTA YOGYAKARTA

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah jurusan/program studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Sosial Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 7^B-sept-2008

Pembimbing

Okrisal Eka Putra, Lc, M.Ag

NIP : 150316229

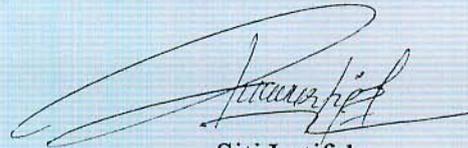
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Siti Latifah
NIM : 04240026
Jurusan : Manajemen Dakwah

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 28-sep 2008



Siti Latifah
NIM : 04240026



DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274) 552230
Yogyakarta 55221

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DD/PP.00.9/1880/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**FUNGSI PENGORGANISASIAN DAKWAH
DI DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA YOGYAKARTA**

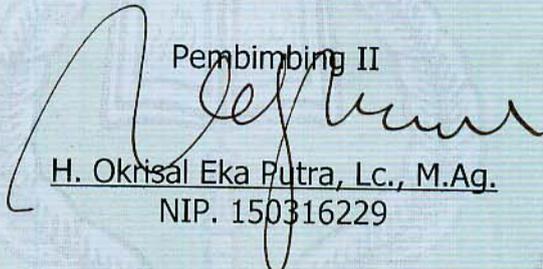
Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Siti Latifah
NIM : 04240026
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 13 November 2008
Nilai Munaqasyah : A/B

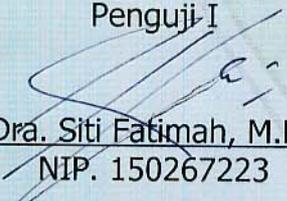
dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

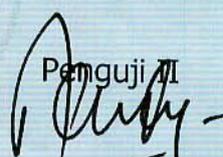
Pembimbing II


H. Okrisal Eka Putra, Lc., M.Ag.
NIP. 150316229

Penguji I


Dra. Siti Fatimah, M.Pd.
NIP. 150267223

Penguji II


H. Andy Dermawan, M.Ag.
NIP. 150314243

Yogyakarta, 25 November 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Dakwah

DEKAN




Prof. Dr. G.M. Bahri Ghazali, MA
NIP. 150220788

MOTTO

()

“Kebenaran yang tidak terorganisir bisa dikalahkan dengan kebathilan yang terorganisir.”

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۗ

“Serulah kejalan Tuhanmu dengan bijaksana, nasehat yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik.” (Qs. An-Nahl : 125)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- ❖ *Bapak dan Ibu yang selalu tulus mendoakanku*
- ❖ *Kedua Saudaraku (Mbak Siti dan Naini)*
- ❖ *Sahabat Karibku...Atiek..Thank's for your help and support*
- ❖ *Aa' Pur terima kasih atas kesetiaan dan kesabaran dalam penantian*
- ❖ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Segala pujian bagi Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang mampu memberikan suri tauladan bagi umatnya sehingga kita mampu terlepas dari zaman jahiliyah menuju zaman sekarang yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah penulis ucapkan atas petunjuk, pertolongan dan kekuatan yang diberikan Alloh SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tercapainya penyusunan skripsi ini. Untuk itu semua, penulis menyampaikan rasa terima kasih tak terhingga kepada :

1. Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selaku pimpinan fakultas.
2. Okrisal Eka Putra, Lc, M.Ag, selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Jurusan (Dra.Siti Fatimah, M.Pd.) dan Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah (Achmad Muhammad, M.Ag.)

4. Dosen-dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Dakwah.
5. Bambang Anjar Jalumurti, S. Pi selaku Sekretaris Umum DPD PKS Kota Yogyakarta.
6. Hari Nur Widodo, S. Pd dan Nasrul Khoiri, S. Far selaku Ketua Pembinaan Cabang dan Ketua Bidang Polhukam DPD PKS Kota Yogyakarta.
7. Mbak Lastri dan seluruh anggota kader maupun pengurus DPD PKS Kota Yogyakarta.
8. Bapak, ibu dan kedua saudaraku yang selalu tulus mendoakan.
9. Sahabatku Atiek, terima kasih atas waktu, perhatian dan supportnya.....
“You are my inspiration”.
10. Aa’ Pur yang selalu setia menungguku.
11. Teman-temanku MD A dan MD B angkatan 2004, *I love you ...friends !*

Akhirnya kepada mereka semua, penulis harus minta maaf karena ternyata hasil akhir penulisan ini tidak sepadan dengan besarnya perhatian dan bantuan yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah pengetahuan bagi pembacanya. Amin.

Yogyakarta , 28 September 2008

Penulis

(Siti Latifah)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kerangka Teori.....	8
1. Tinjauan Pengorganisasian Dakwah	8
a. Pengertian Pengorganisasian Dakwah.....	8
b. Bentuk-Bentuk Pengorganisasian Dakwah	10
2. Tinjauan Partai Politik	16
a. Pengertian Partai Politik.....	16
b. Fungsi Partai Politik.....	18

G. Telaah Pustaka	19
H. Metodologi Penelitian	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Penentuan Subyek dan Obyek Penelitian.....	21
3. Metode Pengumpulan Data	21
4. Metode Analisis Data.....	23
I. Sistematika Pembahasan.....	23

BAB II GAMBARAN UMUM DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI

KEADILAN SEJAHTERA KOTA YOGYAKARTA	25
1. Letak dan Keadaan Geografis	25
2. Sejarah dan Perkembangan Berdirinya	25
3. Visi, Misi, Makna Lambang dan Tujuan Berdirinya	27
4. Sarana dan Prasarana.....	29
5. Wewenang dan Tanggung Jawab Organisasi.....	30
6. Prinsip Kebijakan	38
7. Program Kerja dan Agenda Organisasi.....	38
8. Struktur Organisasi Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta.....	49

BAB III PENERAPAN FUNGSI PENGORGANISASIAN DAKWAH DI

DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA YOGYAKARTA	50
--	----

1. Spesialisasi Kerja	51
2. Departementalisasi Dakwah.....	59
3. Rentang Kendali.....	65
BAB 1V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran-Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dan ketimpangan dalam pengertian judul skripsi “FUNGSI PENGORGANISASIAN DAKWAH DI DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta”, maka penulis perlu memberikan batasan dan penegasan istilah-istilah dalam judul skripsi ini sebagai berikut :

1. Pengorganisasian

Organisasi berasal dari kata *organisme* yang berarti bagian-bagian yang terpadu dimana hubungan satu sama lain diatur oleh hubungan terhadap keseluruhan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹ Sedangkan pengorganisasian berarti suatu proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan untuk mencapai tujuan.²

Pengorganisasian yang dimaksud dalam judul ini adalah rangkaian atau proses aktifitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan dakwah dengan jalan mengelompokkan pekerjaan serta menjalin hubungan kerjasama satuan-satuan organisasi atau petugasnya dengan beberapa langkah tindakan kegiatan yaitu departementalisasi

¹ Zaini Muchtarom, *Dasar-dasar Manajemen Dakwah*, (Jakarta : Al-Amin dan IKFA, 2001)

² M. Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 117.

spesialisasi kerja dan rentang kendali di Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta.

2. Dakwah

Dakwah secara etimologis (kebahasaan) merupakan bentuk mashdar (*verbal noun*) berasal dari kata kerja **عَا دَعَا** (*madhi, past tense*), **عُوِّدُ** (*mudhari, present tense*), **عَوَّةٌ** (*mashdar, verbal noun*) yang berarti memanggil, mengundang, mengajak, menyeru dan mendorong (*to call, to invite, to summon, to propagate and to urge*).³

Secara terminologis dakwah merupakan ikhtiar untuk menanamkan keyakinan, menumbuhkan sikap dan mendorong perilaku manusia menurut nilai-nilai dan ajaran Islam sehingga menjadi umat yang baik (*khairul ummah*) yaitu *ummatan wasatha* (umat yang adil dan terpilih).⁴

Maka yang dimaksud dengan pengorganisasian dakwah dalam skripsi ini yaitu suatu aktivitas menyusun suatu kerangka menjadi wadah bagi segenap kegiatan dakwah dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan serta menjalin hubungan kerjasama satuan-satuan organisasi atau petugasnya dengan beberapa langkah tindakan kegiatan departementalisasi, spesialisasi dan ruang kendali untuk mendorong perilaku manusia menurut nilai-nilai

³ Asad M. Al Kalali, *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), hlm.108.

⁴ *Ibid*, hlm. 15.

ajaran Islam sehingga menjadi *ummatan wasatha* (umat yang adil dan terpilih).

3. Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta

Dewan Pengurus Daerah adalah sebuah partai dakwah yang tampil ke hadapan masyarakat untuk berupaya memperhatikan, memperjuangkan dan melakukan pembelaan kepada seluruh rakyat.

Maka yang dimaksud dengan DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta merupakan sebuah partai dakwah yang tampil ke hadapan masyarakat untuk berupaya memperhatikan, memperjuangkan dan melakukan pembelaan kepada seluruh rakyat dengan ruang lingkup daerah Yogyakarta.

Adapun yang dimaksud dengan Fungsi Pengorganisasian dakwah di Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta yaitu suatu proses penyelenggaraan aktivitas dakwah dengan pemanfaatan fungsi pengorganisasian yang meliputi departementalisasi, spesialisasi kerja dan rentang kendali untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta.

B. Latar Belakang Masalah

Pengorganisasian dakwah merupakan menghimpun dan mengatur Sumber Daya Manusia yang dimiliki ke dalam suatu kerangka struktur dan hubungan menurut pola tertentu sehingga dapat melakukan kegiatan bersama-

sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁵ Di dalam suatu organisasi maupun partai politik sangat diperlukan salah satu fungsi manajemen yaitu pengorganisasian dakwah yang dapat dirumuskan sebagai serangkaian aktivitas dalam menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja di antara satuan-satuan organisasi.⁶ Aktivitas penyelenggaraan organisasi dakwah akan semakin kompleks, hal ini dikarenakan masalah-masalah yang akan dihadapi dakwah akan semakin bertambah banyak sesuai dengan akses kemajuan informasi teknologi dan perkembangan zaman. Berbagai kompleksitasnya permasalahan yang terjadi, kelemahan dakwah lebih banyak dalam hal pengorganisasian dan manajemen.⁷

Islam merupakan agama dakwah yang menyeru umatnya untuk senantiasa berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Persoalan yang pertama kali timbul dalam Islam menurut sejarah bukanlah persoalan keyakinan melainkan politik.⁸ Permasalahan yang terjadi dalam islam sebagai agama dakwah terkait dalam hal politik dan semakin berkembang pada masa pemerintahan Khulafaur Rosyidin. Pada masa tersebut sistem pengangkatan khalifah bukan atas hubungan darah melainkan atas dasar pengangkatan dengan mendapat persetujuan dan pengakuan umat yang dalam istilah Arabnya *bay'ah*.⁹

⁵ Zaini Muchtarom, *Op.Cit*, hlm. 15 – 16.

⁶ A. Rosyad Shaleh, *Management Da'wah Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 177), hlm. 88.

⁷ *Ibid*, hlm. 5.

⁸ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, (Jakarta : UI Pers, 2001), hlm. 88.

⁹ *Ibid*, hlm. 92.

Demikian menurut sejarah Islam tidak terlepas dari persoalan politik dan perkembangan politik juga tidak terlepas dari adanya pemanfaatan fungsi pengorganisasian yang merupakan salah satu bentuk fungsi manajemen. Pengorganisasian dapat menjadi langkah pertama ke arah pelaksanaan rencana yang telah tersusun sebelumnya.¹⁰ Maka dari itu, Islam di Indonesia dalam perkembangannya selalu diwarnai dengan munculnya berbagai bentuk politik.

Dewasa ini demokrasi di Indonesia tidak mungkin terlepas dari adanya partai politik, dimana partai politik merupakan wadah aspirasi rakyat yang nantinya akan disalurkan melalui kelembagaan. Demokrasi hanya dapat tegak dengan keadaan dan keadilan sosial sangat penting karena patokan Islam adalah kaidah fiqh yaitu langkah-langkah kebijaksanaan para pemimpin mengenai rakyat yang mereka pimpin haruslah terkait sepenuhnya dengan kesejahteraan rakyat yang mereka pimpin hal ini menjadi salah satu tujuan dakwah.¹¹ Partai politik mengemban amanah yang diserukan dan untuk atas kepentingan masyarakat. Salah satu partai politik di Indonesia yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai Keadilan Sejahtera seperti yang telah diuraikan di atas merupakan partai politik yang di dalam kegiatan politiknya juga terdapat nilai-nilai dakwah. Fungsi pengorganisasian sangat penting dalam menghubungkan politik dengan dakwah sehingga terjadi suatu koordinasi di dalam partai politik tersebut. Koordinasi yang dimaksud dalam hal ini tidak lain adalah suatu proses hubungan antara suatu kegiatan dakwah

¹⁰ Ahmad Fadli, *Organisasi dan Administrasi*, (Kediri : Manhalun Hasyim Pers, 2002), hlm.30.

¹¹ AM. Saefuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 1996), hlm. 88 – 89.

yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat dan dilakukan oleh partai politik. Dengan adanya pengorganisasian dakwah, maka rencana dakwah menjadi mudah pelaksanaannya, dimana kegiatan-kegiatan dakwah yang dilakukan oleh partai politik akan dibagi-bagi ke dalam tugas-tugas yang lebih terperinci sehingga tugas-tugas tersebut akan memudahkan bagi pendistribusian tugas kepada para pelaksana sehingga setiap pelaksana akan lebih jelas dengan tugas yang diamanahkannya.¹²

Selain itu, pengorganisasian dakwah juga dapat meminimalisir akumulasi pekerjaan yang akan menyebabkan proses penyelenggaraan dakwah menjadi tidak kondusif.¹³ Partai Keadilan Sejahtera merupakan salah satu partai politik di Indonesia dan sebagai suatu wadah kegiatan proses penyelenggaraan aktivitas dakwah membutuhkan pengorganisasian yang mengandung koordinasi terpadunya berbagai kemampuan, keahlian masing-masing pelaksana dakwah dalam suatu kerjasama antar masing-masing komponen. Pengorganisasian juga memudahkan dalam menentukan pemilihan tenaga pelaksana dakwah yang semuanya diarahkan pada sasaran yang telah ditentukan dengan tujuan untuk membantu permasalahan-permasalahan di masyarakat.

Aktivitas pengorganisasian dakwah yang dilakukan oleh suatu partai politik terdiri dari beberapa langkah tindakan, antara lain departementalisasi, spesialisasi kerja, dan rentang kendali. Semua aktivitas pengorganisasian yang telah disebutkan tidak lain untuk menumbuhkan pendalaman terhadap tugas-

¹² A. Rosyad Shaled, *Op.Cit*, hlm. 90.

¹³ *Ibid*, hlm. 88.

tugas dalam penyelenggaraan dakwah. Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa manajemen dakwah mengenai studi tentang pengorganisasian dakwah sangat penting bagi keberlangsungan penyelenggaraan dakwah dalam suatu organisasi dakwah.

Oleh karena itu, dari uraian pembahasan di atas mendorong penulis untuk tertarik mengadakan penelitian dengan judul :

Fungsi Pengorganisasian Dakwah di Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana penerapan fungsi pengorganisasian dakwah di Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan fungsi pengorganisasian dakwah di Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis : dengan penelitian ini bisa lebih memahami fungsi pengorganisasian dakwah di dalam suatu partai politik dan dapat mengaplikasikan teori-teori pengorganisasian yang didapat di perkuliahan.
2. Bagi lembaga : sebagai informasi tambahan bagi parpol yang lain agar lebih mempertimbangkan aspek pengorganisasian dakwah di dalam pelaksanaannya sehingga mampu menciptakan sumber daya dakwah yang profesional untuk pencapaian tujuan.
3. Bagi jurusan : diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi yang sangat penting bagi pengorganisasian jurusan manajemen dakwah.

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Pengorganisasian Dakwah
 - a. Pengertian Pengorganisasian Dakwah

Ahmad Fadli, pengorganisasian dakwah adalah suatu langkah pertama ke arah pelaksanaan rencana yang telah tersusun sebelumnya dalam sebuah kegiatan dan menghasilkan sebuah organisasi sehingga dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang kuat.¹⁴

¹⁴ Ahmad Fadli, *Op.Cit*, hlm. 30.

Indriyo Gitosudarmo, pengorganisasian adalah suatu sistem yang terdiri dari subsistem atau bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya dalam melakukan aktivitasnya.¹⁵

Zaini Muchtarom, dalam buku Dasar-dasar Manajemen Dakwah menyatakan bahwa organisasi dakwah merupakan alat pelaksanaan dakwah agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien, maka pengorganisasian dakwah berarti menghimpun dan mengatur sumber daya maupun tenaga kerja ke dalam suatu kerangka struktur serta hubungan menurut pola tertentu sehingga dapat melakukan kegiatan dakwah bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁶

Menurut M. Munir dan Wahyu Ilaihi pengorganisasian dakwah adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.¹⁷

Berdasarkan pendapat beberapa ahli mengenai pengertian pengorganisasian dakwah maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengorganisasian dakwah merupakan suatu langkah tindakan maupun aktivitas kegiatan dalam suatu organisasi yang dilakukan secara bersama-sama sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh seluruh anggota organisasi.

¹⁵ Indriyo Gitosudarmo, *Perilaku Keorganisasian*, (Yogyakarta : BPFE, 2000), hlm. 2.

¹⁶ Zaini Muchtarom, *Op.Cit*, hlm. 15.

¹⁷ M. Munir dan Wahyu Ilaihi, *Op.Cit*, hlm. 117.

b. Bentuk-bentuk Pengorganisasian Dakwah

Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang sangat diperlukan dalam menentukan suatu langkah tindakan kerjasama masing-masing anggota untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Adapun bentuk-bentuk pengorganisasian dakwah menurut M. Munir dan Wahyu Ilaihi meliputi :

1. Spesialisasi Kerja (Pembagian Kerja)

Spesialisasi kerja menurut Stephen P. Robhins adalah tingkat kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang ditekuninya dan tugas-tugas organisasi dibagi menjadi pekerjaan-pekerjaan terpisah (pembagian kerja).¹⁸

Sedangkan M. Munir dan Wahyu Ilaihi mendefinisikan spesialisasi kerja sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu menjadi lebih baik jika pekerjaan tersebut dipecah-pecah menjadi sejumlah langkah dan tiap langkah diselesaikan oleh individu yang berlainan.¹⁹

Rasulullah selain berfungsi sebagai nabi dan Rasul yang terakhir dengan rendah hati mengatakan bahwa segala sesuatu yang diketahuinya terbatas. Hal tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu yang diketahuinya terbatas. Hal tersebut menunjukkan

¹⁸ M. Munir dan Wahyu Ilaihi, *Op.Cit*, hlm. 120.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 121.

bahwa kita memerlukan spesialisasi karena keterbatasan pengetahuan manusia.²⁰

Firman Allah :

عَمَلُوْهُمَّ مَا دَرَجَتٌ وَّلِكُلِّ

Artinya : *“Tiap-tiap orang mempunyai derajat (tingkatan) menurut pekerjaan masing-masing (Al-Anam : 132)*

Firman Allah :

كَلِمَةٍ شَا ا عَلَى يَعْمَلُ كُلُّ قَل

Artinya : *Katakanlah, “Tiap-tiap orang berbuat menurut yang disukainya” (Bani Israil : 84).*

Ayat-ayat di atas menunjukkan perlunya spesialisasi karena keterbatasan ilmu pengetahuan manusia.²¹ Persoalan yang dihadapi dalam zaman modern semakin kompleks sehingga spesialisasi sangat diperlukan baik dalam organisasi maupun dalam penempatan anggota pada suatu jabatan.

Bentuk-bentuk spesialisasi dalam organisasi dapat dibedakan menjadi :

²⁰ Mochtar Effendy, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, (Jakarta : Bhratara karya Aksara, 1986), hlm. 132.

²¹ *Ibid*, hlm. 175.

a) Organisasi Garis

Dalam bentuk organisasi ini menjelaskan bahwa kekuasaan pimpinan langsung kepada kepala bagian dan kemudian kepada karyawan bawahannya. Masing-masing bagian berdiri sendiri dan kepala bagian menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan di bagiannya.

b) Organisasi Garis dan Staf

Bentuk ini merupakan kombinasi pemberdayaan yaitu adanya pengawasan langsung dan spesialisasi dalam organisasi. Tugas kepala bagian yang berat dibantu oleh spesialis yang dapat memberikan saran-saran kondusif atas beberapa fungsi untuk maksud ini bisa dibentuk sebuah jajaran staf.

c) Organisasi Fungsional

Pada bentuk ini masing-masing kepala bagian adalah spesialis dan para bawahan masih dikendalikan oleh beberapa pimpinan. Pemimpin memiliki wewenang penuh menjalankan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi, bentuk ini lebih menekankan pembagian fungsi. Adapun keuntungan organisasi fungsional, antara lain :

1. Masing-masing fungsi dipegang ahli dalam bidangnya sehingga ada keselarasan antara tugas dan keahlian.
2. Koordinasi internal yang sederhana.

3. Mengembangkan keahlian dan spesialisasi serta jalur yang jelas.

d) Organisasi Komite

Organisasi Komite merupakan asas *brainstorming* (arah pendapat antara berbagai unit fungsional dalam aktivitas organisasi). Fungsi organisasi ini sebagai sebuah forum untuk bertukar pikiran di antara para anggota.

e) Organisasi Matriks

Bentuk pengorganisasian ini merupakan perluasan serta pengejawantahan dari struktur organisasi garis dan staf. Organisasi ini biasa disebut dengan organisasi manajemen proyek, yaitu struktur pengorganisasian yang spesialisasi antar bagiannya dipadukan untuk melaksanakan aktivitas tertentu.²²

2. Departementalisasi Dakwah (Pengelompokan Kerja)

Setelah unit kerja dakwah dibagi-bagi melalui spesialisasi kerja, maka selanjutnya pengelompokan pekerjaan-pekerjaan yang diklasifikasikan melalui departementalisasi sehingga tugas yang sama atau mirip dapat dikelompokkan secara bersama-sama dan dapat dikoordinasikan. Ibnu Syamsi mengungkapkan

²² M. Munir dan Wahyu Ilaihi, *Op.Cit*, hlm. 124.

departementalisasi sebagai pengelompokan tugas ke dalam unit-unit kerja.²³

Menurut Sutarto yang dimaksud dengan departementalisasi atau departemenisasi adalah aktivitas untuk menyusun satuan-satuan organisasi yang akan disertai bidang kerja tertentu atau fungsi tertentu.²⁴

Joseph L. Massie mengemukakan bahwa departementalisasi sebagai suatu cara membagi aktivitas dan membentuknya dalam kelompok khusus yang pada umumnya dinamakan sebagai departementalisasi.²⁵ Tujuan membagi dalam departemen-departemen adalah untuk mengkhususkan aktivitas, menyederhanakan tugas-tugas para manajer dan menegakkan pengawasan.

Dari pendapat para ahli di atas dapat diketahui bahwa pada intinya pembagian kerja/pengelompokan kerja yang dikenal dengan istilah departementalisasi yaitu pembagian kerja para anggota dalam organisasi yang berfungsi agar masing-masing anggota dapat dikoordinasi dengan baik.

Manfaat pembagian kerja (departementalisasi), antara lain :

- a) Membantu memperingati tugas koordinasi unit-unit kerja yang terpisah dan tidak sama.

²³ Ibnu Syamsi, *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen ed. Revisi*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001), hlm. 16.

²⁴ Sutarto, *Dasar-dasar Organisasi*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Pers, 1998), hlm.66.

²⁵ Joseph L. Massie, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta : Erlangga, 1985), hlm. 76.

- b) Memperlancar pengawasan dengan menempatkan seorang kepala/pimpinan yang berkompeten dalam setiap organisasi politik.
- c) Pembagian tugas dalam pekerjaan atas dasar keahlian dan pengetahuan yang bersifat khusus dalam organisasi.
- d) Menghemat biaya karena dengan pembagian tugas pekerjaan dan pengelompokan dalam unit-unit kerja tidak akan terjadi kerangkapan tugas yang berakibat kerangkapan biaya.²⁶

3. Rentang Kendali

Rentang kendali adalah konsep yang merujuk pada jumlah bawahan yang dapat disupervisi oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Urgensi konsep rentang kendali dalam pengorganisasian dakwah adalah dapat menentukan jumlah tingkatan dan kuantitas manajer yang dimiliki oleh organisasi dakwah.²⁷

Faktor yang mempengaruhi rentang kendali antara lain :

1. Kesamaan Fungsi

Semakin banyak kesamaan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja, rentang semakin melebar (artinya semakin banyak bawahan yang dapat dipimpin dan diawasi dengan baik).

²⁶ Ibnu Syamsi, *Op.Cit*, hlm. 19.

²⁷ M. Munir dan Wahyu Ilaihi, *Op.Cit*, hlm. 128.

2. Kedekatan Geografis

Semakin dekat letak penempatan kerja secara fisik, rentangan semakin melebar.

3. Tingkat Pengawasan Langsung

Semakin sedikit pengawasan langsung yang dibutuhkan, rentangan semakin melebar.

4. Tingkat Koordinasi yang Dibutuhkan

Semakin berkurang koordinasi yang dibutuhkan, rentangan semakin melebar.

5. Perencanaan yang Dibutuhkan Manajer

Semakin sedikit perencanaan yang dibutuhkan oleh pimpinan, rentangan semakin melebar.

6. Bantuan Pengorganisasional

Bantuan organisasional yang tersedia bagi pengawas lebih banyak bantuan yang diterima pengawas dalam fungsi-fungsi.²⁸

2. Tinjauan tentang Partai Politik

a. Pengertian Partai Politik

Menurut Carl J. Friedrich sebagaimana dikutip dari Miriam Budiarto mengatakan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau

²⁸ Ibnu Syamsi, *Op.Cit*, hlm. 24 – 25.

mempertahankan penguasaan pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil dan materiil.²⁹

Menurut R.H. Soltau sebagaimana dikutip dari Miriam Budiardjo mendefinisikan bahwa partai politik sebagai berikut :

A group of citizens more or less organized, who act as a political unit and who by the use of their voting power, aim to control the government and carry out their general politics.

(Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka).³⁰

Menurut Miriam Budiardjo dalam buku Sistem Politik Indonesia mengemukakan bahwa partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.³¹

Sigmund Neumann dalam karangannya *Modern Political Parties* mengemukakan definisi sebagai berikut :

A political party is the articulate organization of society's active political agents those who are concerned with the control of

²⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 160.

³⁰ *Ibid*, hlm. 161.

³¹ A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta : Graha Ilmu, 2007), hlm. 102.

*governmental power and who compete for popular support with another group or groups holding divergent news.*³²

(Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda).

b. Fungsi Partai Politik

1) Partai sebagai komunikasi politik

Yaitu menyalurkan aneka ragam pendapat aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat dalam berkurang.

2) Partai sebagai sarana sosialisasi politik

Yaitu mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional. Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah-ceramah penerangan, kursus kader dan kursus penataran.

3) Partai politik sebagai sarana *recruitment* politik yaitu parpol berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*).

³² Miriam Budiardjo, *Op.Cit*, hlm. 162.

- 4) Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*)
Yaitu partai politik berusaha mengatasi suasana persaingan dan perbedaan pendapat di masyarakat.³³

G. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian, penulis juga melihat adanya penelitian-penelitian mengenai pengorganisasian. Adapun telaah pustaka yang pernah dijumpai penulis di Fakultas Dakwah diantaranya :

Ahmad Rizano (2004) dalam skripsinya yang berjudul “Konsepsi Moral Politik Partai Keadilan Sejahtera”. Dalam skripsi ini membahas tentang konsepsi moral politik yang dibangun Partai Keadilan Sejahtera bersumber Al-Qur’an dan Hadits sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa moral politik sebagai suatu wacana dan sekaligus hakikat politik menyangkut aspek-aspek normatifitasnya dalam hal ini meliputi agama, moral, dan tradisi.³⁴

Muhammad Zamroni (2003) dalam skripsinya yang berjudul “Dakwah dan Politik (Studi terhadap Partisipasi Kiai dalam Politik di Kabupaten Kudus)”. Dalam skripsi ini membahas tentang fenomenologis Kiai di Kudus terhadap makna politik dan dakwah bagi Kiai, pola-pola kepemimpinan Kiai, interaksi Kiai dengan masyarakat dan penguasa, bagaimana Kiai

³³ *Ibid*, hlm. 163 – 165.

³⁴ Ahmad Rizano, “Konsepsi Moral Politik Partai Keadilan Sejahtera”, *Skripsi tidak dipublikasikan*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2004).

mengkonstruksikan pandangan politiknya dan sejauhmana partisipasi dan kontribusi Kiai dalam praktis.³⁵

Suryanta Bakti Susila (2005) dalam skripsinya yang berjudul “Konstruksi Wacana Tentang Dakwah Politik Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilu 2004 di Majalah Saksi”. Dalam skripsi ini membahas tentang konstruksi wacana dakwah politik PKS dengan menggunakan majalah Saksi sebagai strategi pembingkai (*framing*) tentang dakwah politik Partai Keadilan Sejahtera”.³⁶

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu keseluruhan landasan nilai-nilai yang menyangkut filsafat keilmuan, asumsi-asumsi, etika, norma yang menjadi aturan-aturan standar yang dipergunakan untuk menafsirkan dan menyimpulkan data penelitian.³⁷ Sedangkan metode penelitian merupakan cara melakukan penelitian data untuk memecahkan masalah dalam penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yakni sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan obyek penelitian dengan memusatkan perhatian pada penemuan

³⁵ Muhammad Zamroni, “Dakwah dan Politik (Studi terhadap Partisipasi Kiai dalam Politik di Kabupaten Kudus), *Skripsi tidak dipublikasikan*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2003).

³⁶ Suryanti Bakti Susila, “Konstruksi Wacana Tentang Dakwah Politik Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilu 2004 di Majalah Saksi”, *Skripsi tidak dipublikasikan*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2005).

³⁷ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 223.

fakta-fakta (*fact finding*) sebagaimana keadaan sebenarnya, kemudian melakukan representasi obyektif dengan mendeskripsikan gejala-gejala data/fakta sebagai adanya representasi data dengan diiringi pengolahan agar dapat diberikan penafsiran.³⁸

2. Penentuan Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sumber utama data penelitian yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.³⁹ Adapun subyek penelitian ini adalah :

- a. Sekretaris Umum DPD PKS Kota Yogyakarta yaitu Bambang Anjar J, S.Pi.
- b. Bidang Politik dan Hukum yaitu Nasrul Khoiri, S.Far.
- c. Bidang Pembinaan Cabang yaitu Hari Nur Widodo, S.Pd.
- d. Masyarakat sekitar DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta

Obyek penelitian ini yaitu mengenai studi tentang pengorganisasian dakwah, sedangkan sumber data penelitian ini yaitu Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data.⁴⁰ Untuk membantu pengumpulan data penulis menggunakan metode pengumpulan data diantaranya :

³⁸ Hadari dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Pers, 1999), hlm. 74.

³⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 34.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), hlm. 134.

a. Metode Observasi *Partisipatory*

Observasi merupakan pengamatan langsung dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis fenomena yang diselidiki.⁴¹ Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi berstruktur dengan melakukan pengamatan secara langsung dan sistematis ke lokasi penelitian di Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera kota Yogyakarta.

Penulis menggunakan metode ini untuk mengetahui penerapan fungsi pengorganisasian di Dewan Pengurus Daerah PKS Kota Yogyakarta.

b. Metode Wawancara

Menurut Sutrisno Hadi, metode wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan mengenai tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan responden.⁴²

Metode ini dilakukan penulis untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian dengan pertanyaan kepada informan sudah dipersiapkan tetapi cara penyampaiannya dilangsungkan secara bebas dan terikat oleh pedoman wawancara.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data menggunakan dokumen sebagai sumber data berupa buku-buku,

⁴¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research : Jilid 2* (Yogyakarta : Andy Offset, 1986) hal. 134.

⁴² *Ibid*, hlm. 139.

dokumen-dokumen, surat kabar yang ada kaitannya dengan masalah yang hendak diteliti dengan cara melihat dan mengamati langsung.⁴³

Penulis menggunakan teknik ini untuk memperoleh data tentang kondisi umum daerah penelitian dan data-data yang masih ada kaitannya dengan pengorganisasian dakwah.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis deskriptif analitik yaitu metode yang digunakan di dalam suatu penelitian dengan cara mengumpulkan, menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh dalam penelitian kemudian dianalisis sehingga berdasarkan data itu dapat ditarik pengertian-pengertian serta kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan memahami skripsi ini, maka perlu diuraikan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama pendahuluan, bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi tentang gambaran umum Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Yogyakarta meliputi letak dan keadaan geografis, sejarah dan perkembangan berdirinya, visi, misi, makna lambang dan tujuan berdirinya, sarana dan prasarana, wewenang dan tanggung jawab

⁴³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1 (Yogyakarta : Andy Offset, 2001), hlm. 95.

organisasi, prinsip kebijakan, program kerja dan agenda organisasi dan struktur organisasi.

Bab Ketiga pembahasan, bab ini berisi tentang analisis penerapan fungsi pengorganisasian dakwah di Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta.

Bab Keempat penutup, bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran serta pada lembaran setelah Bab IV dicantumkan daftar pustaka.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari pembahasan terhadap pokok permasalahan yang diajukan dalam skripsi dengan mendasarkan diri pada data hasil penelitian beserta proses penganalisaan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta dalam menerapkan fungsi pengorganisasian bagi para kader partai berlangsung efektif, hal ini dibuktikan dengan semangat kerja dan loyalitas yang tinggi serta tanggungjawab dari seluruh kader partai dalam melakukan kegiatan-kegiatan dakwah yang berorientasi untuk mengharapkan ridho dan pahala dari Alloh SWT dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Bentuk spesialisasi kerja (pembagian kerja) di Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta termasuk kedalam organisasi fungsional dengan menekankan pada spesialisasi SDM yaitu kepala bagian/ketua bidang merupakan spesialis dengan mengendalikan kerja para kader agar tugas pekerjaan dapat sesuai dengan sasaran sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
3. Departementalisasi dakwah (pengelompokkan kerja) di Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta berdasarkan pada

program kerja yang sudah ada/sesuai dengan keputusan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD).

4. Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kader partai melalui rentang kendali dilakukan melalui rapat pengurus harian (PH) Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta kemudian baru dilakukan rapat evaluasi bersama yang diprakarsai oleh Majelis Pertimbangan Daerah dan hasil evaluasi akan direkomendasikan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD).

B. Saran – Saran

1. Kepada pengurus maupun kader Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta agar lebih banyak menerapkan fungsi pengorganisasian dakwah agar eksistensi Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai dakwah semakin solid dan semua aktivitas kegiatan dapat terencana dengan baik sehingga akan mendapatkan respon baik dari masyarakat melalui kegiatan – kegiatan sosial yang berkaitan dengan nilai- nilai dakwah.
2. Perlu diadakan lebih banyak pelatihan–pelatihan dakwah, keorganisasian, pengembangan motivasi, pengetahuan tentang polhum,dll sebagai upaya untuk mengembangkan potensi dan kualitas SDM kader Partai melalui diskusi maupun seminar.
3. Hendaknya pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta menyediakan kader / pengurus yang melayani tamu yang hendak

melakukan penelitian atau yang sekedar akan mencari informasi sehingga tamu tidak perlu menunggu terlalu lama.

4. Sedangkan yang berkaitan dengan penelitian, penulis menyarankan agar diadakan penelitian yang luas lagi mengenai fungsi pengorganisasian dakwah bukan hanya pada organisasi politik melainkan juga pada lembaga-lembaga dakwah yang lain serta tidak menutup kemungkinan pada Bank Muamalat Terpadu (BMT) maupun Bank Muamalat Syari'ah yang lain untuk mengetahui kualitas dan kuantitas SDM serta mekanisme kinerja anggota/karyawan yang dihasilkan melalui penerapan fungsi pengorganisasian.

Rasa syukur yang tiada terkira menghiasi lubuk hati yang paling dalam senantiasa penulis haturkan kepada Alloh SWT, yang senantiasa telah memberikan rahmat kesehatan, kekuatan, kesabaran dan segalanya kepada penulis sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

Upaya yang maksimal telah penulis lakukan, hambatan dan rintangan telah penulis lalui. Namun keterbatasan jualah yang ada dalam diri penulis, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca akan penulis terima demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Alloh SWT penulis memohon ampunan, kekuatan, rahmat dan hidayah-Nya. Semoga hasil penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi agama, nusa bangsa, penulis serta bagi pembaca. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fadli, *Organisasi dan Administrasi*, (Kediri : Manhalun Hasyim Pers, 2002).
- Ahmad Rizano, *Konsepsi Moral Politik Partai Keadilan Sejahtera, Skripsi tidak dipublikasikan*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2004).
- AM. Saefuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 1996).
- A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta : Graha Ilmu, 2007).
- A. Rosyad Shaleh, *Management Da'wah Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 177).
- Asad M. Alkalali, *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta : Bulan Bintang,1987)
- Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta : Kencana, 2005).
- Hadari dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Pers, 1999)
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, (Jakarta : UI Pers, 2001)
- Ibnu Syamsi, *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen ed. Revisi*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001).
- Indriyo Gitosudarmo, *Perilaku Keorganisasian*, (Yogyakarta : BPFE, 2000)
- Joseph L. Massie, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta : Erlangga, 1985).
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei*, ed. Revisi (Jakarta : LP3ES, 1989).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006).
- Mochtar Effendy, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, (Jakarta : Bhratara karya Aksara, 1986).

Muhammad Zamroni, "Dakwah dan Politik (Studi terhadap Partisipasi Kiai dalam Politik di Kabupaten Kudus), *Skripsi tidak dipublikasikan*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2003).

M. Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta : Kencana, 2006).
Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997).

Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990).

Suryanti Bakti Susila, Konstruksi Wacana Tentang Dakwah Politik Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilu 2004 di Majalah Saksi, *Skripsi tidak dipublikasikan*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2005).

Sutarto, *Dasar-dasar Organisasi*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Pers, 1998).

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid 1* (Yogyakarta : Andy Offset, 2001).

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research : Jilid 2* (Yogyakarta : Andy Offset, 1986).

Zaini Muchtarom, *Dasar-dasar Manajemen Dakwah*, (Jakarta : Al-Amin dan IKFA, 2001)



LAMPIRAN

INTERVIEW GUIDE

A. Gambaran Umum

1. Bagaimana latar belakang berdirinya DPD PKS kota Yogyakarta ?
2. Bagaimana letak dan keadaan geografis DPD PKS kota Yogyakarta ?
3. Apa yang menjadi landasan tujuan berdiri, Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera ?
4. Apa yang menjadi makna lambang dan Prinsip Kebijakan DPD PKS kota Yogyakarta?
5. Bagaimana struktur organisasi DPD PKS kota Yogyakarta ?
6. Bagaimana program kerja dan agenda organisasi DPD PKS kota Yogyakarta ?
7. Fasilitas apa saja yang dimiliki DPD PKS kota Yogyakarta ?
8. Bagaimana tugas dan wewenang DPD PKS kota Yogyakarta ?

B. Wawancara Sekretaris Umum DPD PKS kota Yogyakarta (Bambang Anjar Jalumurti, S.Pi.)

1. Apa tugas dari sekretaris umum DPD PKS kota Yogyakarta ?
2. Apakah di DPD PKS kota Yogyakarta ada spesialisasi kerja (pembagian kerja) ?
3. Berdasarkan apa spesialisasi kerja dilakukan ?
4. Spesialisasi kerja yang dilakukan dalam bentuk apa ?
5. Apakah di DPD PKS kota Yogyakarta ada departementalisasi kerja ?

6. Apakah manfaat dari departementalisasi kerja ?
7. Bagaimanakah bentuk rentang kendali di DPD PKS kota Yogyakarta ?

C. Wawancara Bidang Politik dan Hukum (Nasrul Khoiri, S.Far.)

1. Apa tugas dari bidang politik dan hukum ?
2. Apakah dalam bidang ini juga menerapkan fungsi pengorganisasian ?
3. Bagaimanakah bentuk penerapan spesialisasi, depermentalisasi, dan rentang kendali pada bidang politik dan hukum ?
4. Apakah ciri khas dari PKS yang membedakan dengan partai politik lain yang ada di Indonesia ?

D. Wawancara Bidang Pembinaan Cabang (Hari Nur Widodo,S.Pd.)

1. Apa tugas dan wewenang dari bidang pembinaan daerah DPD PKS kota Yogyakarta ?
2. Apakah dalam bidang pembinaan daerah juga menerapkan spesialisasi kerja ?
3. Bagaimana bentuk departementalisasi kerja pada bidang pembinaan cabang ?
4. Seberapa jauh manfaat dari fungsi pengorganisasian dalam hal rentang kendali ?